

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi memiliki andil yang sangat berperan dalam seluruh proses penciptaan sumberdaya manusia. Untuk mewujudkan perguruan tinggi yang sehat dibutuhkan dukungan dari semua unsur pemangku jabatan (*stakeholders*) yaitu pembuat dan pengawas kebijakan, pegawai sebagai pelaksana kebijakan, masyarakat perguruan tinggi dan masyarakat umum sektor produktif, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, alumni perguruan tinggi, media masa, serta kelompok masyarakat lainnya.

Pendidikan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Seperti yang telah diketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan taraf pendidikan, sudah selayaknya masyarakat mengedepankan pendidikan sebagai salah satu unsur yang ada dalam diri kita. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magiste, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut dosen. Dalam hal ini perlu diketahui kembali bahwa perguruan tinggi telah dibedakan menurut pengelolannya yaitu: 1) perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang pengelolaan dan regulasinya dilakukan oleh Negara. 2) perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang pengelolaannya dan regulasinya dilakukan oleh swasta.

Sebuah organisasi pendidikan memiliki tujuan yang ingin dicapai tujuan tersebut

terwujud dengan tercapainya visi organisasi. Dalam proses pencapaian visi tersebut ada tindakan-tindakan manajerial yang dilakukan, agar organisasi dapat bekerja secara optimal dan efektif. Tindakan-tindakan manajerial tersebut, menurut Terry dalam Ardana (2012:78) meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (actuating) dan pengawasan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen tersebut, maka visi organisasi akan tercapai secara sistematis dan terukur.

Perencanaan atau yang sudah akrab dengan istilah *planning* adalah satu dari fungsi management yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan ini selalu melekat pada kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Perencanaan merupakan kegiatan inti manajemen, karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut. Dengan perencanaan tersebut memungkinkan para pengambil keputusan atau manajer untuk menggunakan sumber daya mereka secara berhasil guna dan berdaya guna

Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan sebaiknya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena lingkungan lembaga pendidikan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman, maka diperlukan komunikasi dalam hal sistem perencanaan pendidikan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, penyusunan perencanaan, pengawasan, evaluasi, serta perumusan kebijakan yang sangat memerlukan komunikasi sebagai bahan pendukung pada perencanaan pendidikan. Dalam hal ini diperlukan suatu sistem pendekatan yaitu perencanaan pendidikan partisipatori.

Perencanaan sangat penting agar visi organisasi dapat dicapai secara terencana dan tersistematis. Perencanaan program kerja adalah sebuah tindakan perencanaan pelaksanaan program yang dilakukan secara sistematis, dengan capaian tujuan tertentu pada satu periodisasi kepemimpinan. Dengan demikian program kerja yakni, program yang direncanakan untuk dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan capaian tujuan tertentu pada satu periodisasi kepemimpinan dalam organisasi. Perencanaan program kerja dibuat pada kurun waktu satu kepemimpinan, karena harus menjawab capaian yang diharapkan saat sang pemimpin melaksanakan tugas memimpin organisasi. (Sagala, 2007:122).

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam upaya pelayanan masyarakat yang lebih baik, dengan penggunaan anggaran publik yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. (1) Penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) adalah penganggaran bagi manajemen untuk dapat mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dalam keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk pada efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Seringkali perencanaan program dibuat hanya dengan cara melakukan plagiasi atau replikasi program-program yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, akan tetapi jika mengesampingkan kegiatan analisa terhadap sumber-sumber daya organisasi, maka plagiasi dan replikasi program akan membuat organisasi tidak berkembang dan bergerak ditempat. Perencanaan program

haruslah memperhatikan capaian dan kondisi organisasi, sehingga ada keberlanjutan program dalam menjawab capaian visi organisasi.

Menurut Harjanto (2008:90) ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh staf dan pimpinan jika organisasi memiliki sebuah perencanaan yang baik, yaitu:

- 1) Perencanaan akan menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara teratur
- 2) Perencanaan akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif
- 3) Perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena dalam perencanaan ditetapkan berbagai standar.
- 4) Perencanaan memberikan suatu landasan pokok fungsi manajemen lainnya, terutama untuk fungsi pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dibidang pendidikan yang berkualitas dan bermartabat, dengan memberi ruang yang luas kepada Kementerian Agama sehingga program Pendidikan Islam yang tujuan utamanya adalah memberi akses seluas-luasnya kepada anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dapat tercapai. Penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan Islam yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas Pemerintah dibidang pendidikan, sehingga dalam akuntabilitas itu sendiri digunakan prinsip-prinsip yang menjaga kesesuaian perencanaan dan implementasi program dan kegiatan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi program dan kegiatan dapat mengindikasikan adanya penyimpangan, yang berarti program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak akuntabel dan juga terindikasi tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.



Untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi program dan kegiatan dibangunlah sebuah pemahaman yang rasional terhadap sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan Islam yang mampu mempersatukan beragam ide maupun pemikiran tentang tata kelola anggaran dengan terlebih dahulu ditetapkannya berbagai instrumen pendukung sehingga pelaksanaan anggaran tidak keluar dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mendukung peningkatan kualitas pembangunan dan kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan melalui standarisasi dan profesionalitas yang sedang dilakukan menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan. Dalam rangka menjamin efektifitas program dan kegiatan diperlukan konsistensi dan sinkronisasi pada seluruh tahapan pengelolaan program dan kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan dan evaluasi kegiatan.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 tentang Pendidikan Tinggi telah dijelaskan bahwa: perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam pasal 1 ayat 4 menjelaskan pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 1 Susunan perguruan tinggi negeri terdiri dari: a. unsur

pimpinan seperti rektor dan pembantu rektor, b. senat universitas/institut, c. unsur pelaksana akademik seperti fakultas, lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat, d. unsur pelaksana administrasi seperti biro diantaranya adalah biro umum dan biro akademik, e. unsur penunjang yaitu unit pelaksana teknis, f. unsur lain yang dianggap perlu.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) dalam bahasa Arab adalah جامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو dan dalam bahasa Inggris adalah *State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau* merupakan hasil pengembangan/peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Transformasi ini dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tata kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005.

Struktur organisasi Universitas Islam (UIN) Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Suska Riau serta peraturan Mentri Agama RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 tahun 2013 tantang Organisasi dan Tatakerja UIN Suska dan Peraturan Mentri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Suska Riau, organisasi Universitas terdiri dari Organ Pengelola, Organ pertimbangan dan Organ Pengawas.

Adapun Pembagian Biro di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim terdiri dari 2 Biro yaitu:

- 1) Biro AAKK yang terdiri dari :
  - a. Bagian Akademik
  - b. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
  - c. Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
- 2) Biri AUPK terdiri dari :
  - a. Bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum
  - b. Bagian Perencanaan
  - c. Bagian Keuangan dan Akuntansi
  - d. Bagian Umum

Sebagai gambaran bagaimana sumberdaya manusia yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat diketahui dari tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1. Jumlah Dosen Tetap, Dosen Kontrak dan Pegawai Administrasi UIN Suska Riau Tahun 2018**

No	Rincian	Jumlah Pegawai	%
1.	Dosen Tetap (PNS)	507 Orang	43
2.	Dosen Kontrak	161 Orang	14
3.	Tenaga Administrasi Rektorat dan Fakultas	520 Orang	45
	<b>Jumlah</b>	<b>1.188 Orang</b>	<b>100</b>

Sumber: Rekrorat UIN Suska Riau Tahun 2018

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan organisasi vertikal yang merupakan lembaga perguruan tinggi dibawah Kementrian Agama Republik Indonesia, sebuah organisasi yang melakukan proses pelayanan publik di bidang

pendidikan tinggi, sehingga dalam proses perjalanan organisasi tentu menemukan yang disebut dengan pelayanan publik, lembaga yang dimaksud dalam penelitian ini penulis adalah proses sebagai fungsi pelayanan publik sepanjang birokrasi itu berfungsi sebagai fungsi pelayanan sudah dipastikan ada kendala dan keluhan yang sebabkan oleh buruknya pelayanan yang disuguhkan oleh lembaga atau organisasi birokrasi tersebut.

Sementara itu jumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang terdiri dari 8 (delapan) fakultas dan 1 (satu) program pasca sarjana sebanyak 26.310 yang terdiri dari 11.570 mahasiswa laki-laki dan 14.740 mahasiswa perempuan. Untuk lebih jelas bagaimana gambaran mahasiswa UIN Suska Riau berdasarkan fakultas dapat diketahui pada tabel 1.2. berikut ini:

**Tabel 1.2. Jumlah Mahasiswa UIN Suska Riau Tahun 2018**

No	Fakultas	Mahasiswa		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Syariah dan Ilmu Hukum	1.934	2.187	4121	15.66
2.	Tarbiyah dan Keguruan	1.553	5.331	6884	26.16
3.	Ushuluddin	303	271	574	2.18
4.	Dakwah dan Komunikasi	1.119	1.039	2158	8.20
5.	Saint dan Teknologi	2.728	1.660	4388	16.68
6.	Psikologi	373	1.002	1375	5.23
7.	Ekonomi dan Ilmu Sosial	2.100	2.489	4589	17.44
8.	Pertanian dan Peternakan	957	542	1499	5.70
9.	Pasca Sarjana	503	219	722	2.74
<b>Jumlah Mahasiswa</b>		<b>11.570</b>	<b>14.740</b>	<b>26.310</b>	<b>100</b>

Sumber: Rektorat UIN Suska Riau Tahun 2018

Sebagai lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni secara integral pada tahun 2023 maka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mempunyai fungsi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim;
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan menggunakan paradigma Islami;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni dengan menggunakan paradigma Islami;
- 4) Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Suska Riau, dalam pasal 27 menjelaskan Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf a yang selanjutnya disebut Biro AUPK yang mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan ,peraturan perundang-undangan, ketatausahaan, dan kerumatanggaan yang meliputi:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja tahunan pada Biro administrasi umum dan keuangan
- 2) Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum dan keuangan
- 3) Melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan inventarisasi dan usul penghapusan barang perlengkapan

4) Menyusun konsep instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan lembaga berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan

Selanjutnya dalam pasal 29 Biro AUPK sebagaimana terdiri dari:

- 1) Bagian Umum
- 2) Bagian perencanaan
- 3) Bagian Keuangan dan Akutansi
- 4) Bagian Organisasi , Kepegawaian dan Hukum
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sementara itu pada pasal 34 menjelaskan Bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data informasi dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran
- 3) Pelaksanaan evaluasi program, anggaran dan pelaporan

Dalam perencanaan pendidikan memerlukan beberapa konsep mengenai perubahan lingkungan pendidikan, kebutuhan organisasi pendidikan akan perencanaan akibat perubahan lingkungan, ciri-ciri sistem yang akan dipakai dalam perencanaan, dan beberapa teori perencanaan. Hudson menunjukkan 5 teori perencanaan yaitu radikal, advocacy, transactive, synoptik, dan incremental yang dikatakan sebagai taxonomy. (Pidarta, 2005:56).

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama yang menjadi pedoman oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam rangka pembangunan pendidikan tinggi keagamaan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melakukan pemetaan pendidikan yang bermutu melalui penataan kelembangaan yang

efisien, mengelola pembiayaan pendidikan yang berkeadilan dan akuntabel, serta menerapkan konsep *good university governance* dalam pengelolaan pendidikan. Melalui penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi ini diharapkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN ) dapat berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan ( *knowledge-based society* ) pada era kesejagatan.

Rencana strategis yang disusun oleh UIN Suska Riau harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran, karena renstra tersebut akan dijadikan acuan oleh UIN Suska Riau dalam mencapai visi dan misi yang disusun dan disepakati. Oleh karena itu UIN Suska Riau harus mengalokasikan program dan anggaran untuk mewujudkan kegiatan tersebut dalam struktur anggaran yang sudah terpola. Dalam struktur anggaran, program, kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, input, rincian, detil anggaran ini merupakan rangkaian konsisten yang saling mendukung dari suatu sistem penganggaran yang terpadu dan tidak terpisahkan sebagai perwujudan dari reformasi perencanaan dan penganggaran.

Berikut dapat ditampilkan pagu anggran pada UIN Suska Riau selama Periode 2015 – 2018, seperti dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3. Anggran Pada UIN Suska Riau Selama Periode 2015 – 2018**

No	Fakultas Unit/ Lembaga	Pagu			
		2015	2016	2017	2018
1	Fakultas	18.345.444.000	16.320.455.000	21.990.103.000	17.650.550.000
2	Pascasarjana	5,645,938,000	5,909,943,000	10,191,745,000	10,191,705,000
3	Lembaga	2,828,538,000	1,683,365,000	2,822,260,000	2,242,731,000
4	Pusat	4,338,210,000	4,877,202,000	1,577,770,000	2,659,419,000

5	Biro	148,918,575,000	18,514,396,000	81,289,523,000	98,139,464,000
6	SPI	507,840,000	355,180,000	314,000,000	170,830,000
	Jumlah	195,942,039,000	164,583,809,000	122,601,038,000	125,707,950,000

Sumber: Biro AUPK UIN Suska Riau Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pagu anggaran pada UIN Suska Riau pada tahun 2015 sebesar Rp. 195,942.039.00, pada tahun berikutnya terjadi penurunan pagu anggaran dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 164.583.809.000, pada tahun 2017 sebesar Rp. 122.601.038.000 dan pada tahun 2018 pagu anggaran sebesar Rp. 125.707.950.000,-

Setiap kegiatan mencerminkan tugas dan fungsi dari setiap unit-unit sesuai yang ada dalam renstra dan kinerja Rektor UIN Suska Riau. Dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap kegiatan menetapkan output-output yang menjadi sasaran dan indikator capaian kinerja kegiatan. Dalam mencapai output tersebut tersebut dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit yang berupa proses alur pencapaian output kegiatan, yaitu dalam bentuk komponen-komponen kegiatan. Setiap komponen kegiatan terdiri dari bagian-bagian atau detil-detil/rincian yang diperlukan dalam melaksanakan proses atau langkah-langkah yang menjadi struktur dari suatu komponen kegiatan, di dalam detil atau rincian inilah terdapat komponen biaya anggaran.

Pada renstra UIN Suska Riau dijabarkan program-program yang mendukung Tri Darma Perguruan Tinggi, dimana Tri Darma Perguruan Tinggi ini berisikan terkait Akademik, Penelitian, Pengabdian dan Keorganisasian, dan di dalam renstra tersebut telah pula pembagian kewenangan dan urusan masing-masing bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Suska Riau, diantaranya:

- 1) Urusan akademik, melaksanakan program-program terkait peningkatan proses belajar mengajar dosen, peningkatan mutu dosen, bagaimana peningkatan untuk akreditasi dan sebagainya.
- 2) Urusan penelitian, melaksanakan program-program terkait peningkatan penelitian dosen baik dalam negeri atau luar negeri, Jurnal terakreditasi dan lain sebagainya.
- 3) Urusan Pengabdian melaksanakan program-program terkait penambahan pembangunan gedung kuliah yang masih kurang, meningkatkan sumber daya, manusia baik dosen ataupun pegawai.
- 4) Urusan Keorganisasian melaksanakan program-program terkait membuat program-program banyak diluar renstra dan kinerja Rektor.

Sementara itu prioritas kebijakan yang tertuang dalam *Roadmap* Program Strategis UIN Suska Riau Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran berbasis integrasi keilmuan
- 2) Peningkatan mutu penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis integrasi keilmuan
- 3) Intensifikasi peran UIN Suska Riau dalam pemberdayaan masyarakat berkeadaban
- 4) Penguatan sistem manajemen
- 5) Peningkatan kapasitas sumberdaya insani

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan terkait fenomena masalah penelitian yang terjadi saat ini diantaranya:

- 1) Bagian Perencanaan masing-masing fakultas masih melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran belum berdasarkan dengan ketentuan yang ada,

seharusnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di UIN Suka Riau haruslah berpedoman pada Renstra UIN Suska Riau.

**Tabel 1.4 Kegiatan Yang Tidak Sesuai Renstra UIN Suska Riau**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Benchmarking kebeberapa universitas terkemuka	161.740.000
2	Benchmarking and implementating halal food certification (Case studi: Muslim communities)	42.450.000
3	Benchmarking and implementating halal food certification (Case studi: Muslim communities)	186.250.000
4	Benchmark penerapan layanan prima pada Universitas Kristen Petra Surabaya	53.510.000
5	Benchmarking kerjasama ke UIN Maulana Malik	102.296.000
6	Benchmarking and implementating halal food certification (Case studi: Muslim communities)	193.250.000
7	Character building development training	127.385.000
8	Kegiatan character building training pelaksanaan keuangan pada UIN Suska Riau tahun 2017	297.050.000
9	Peningkatan capacity building pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	125.280.000
10	Penguatan building layanan organisasi	120.430.000
11	Kegiatan Capacity building team fakultas sains dan teknologi	69.967.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.479.608.000</b>

Sumber: Biro AUPK UIN Suska Riau Tahun 2018

- 2) Perencanaan keuangan yang ada di UIN Suska Riau belum tertata dan terpola dengan baik dimana pada awal tahun anggaran seharusnya pada unit-unit kerja yang ada di UIN Suska Riau sudah mendapatkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai dasar melaksanakan kegiatan-kegiatan, akan tetapi unit-unit tersebut masih saja melakukan revisi POK sampai bulan maret sehingga banyak kegiatan yang berubah dan tidak sesuai dengan renstra dan kinerja Rektor sehingga berdampak kepada pemotongan anggaran karena POK di susun tidak tepat waktu dan tidak melalui perencanaan yang baik.

**Tabel 1.5 Pemotongan Anggaran Pada UIN Suska Riau**

	Tahun	Pagu Anggaran	Keterangan
1	2015	Rp. 1.581.011.000	Revisi Kegiatan
2	2016	Rp.13.999.000.000	Revisi Kegiatan
3	2017	Rp. 15.997.955.000	Revisi Kegiatan

Sumber: Biro AUPK UIN Suska Riau Tahun 2018

- 3) Sinkronisasi antara program yang direncanakan oleh masing-masing unit yang ada saat ini dengan capaian indeks kinerja yang tertuang pada Rencana Induk Penganggaran (RIP) dan Renstra UIN Suska Riau belum terlaksana dengan baik sehingga hal ini mengakibatkan adanya temuan penitipan anggaran di satuan kerja lain yang tidak terkait tupoksi satuan, adanya indikasi atau revisi anggaran tidak melalui prosedur yang semestinya. Hal tersebut berdampak kepada SILPA akhir tahun anggaran yang ada pada UIN Suska Riau.

**Tabel 1.6 Realisasi Program dan Kegiatan UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2017**

No	Nama Program dan	Jumlah	Realisasi	%
----	------------------	--------	-----------	---

	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
<b>I.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			
	1) Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	73.854.657.000	61.399.637.510	83,14
	2) Sarana Prasarana Perpustakaan Pada PTKI	1.649.300.000	952.048.500	57,72
	3) Sarana Prasarana PTKI	18.305.246.000	16.937.533.481	92,53
	4) Penerimaan Mahasiswa Baru	1.851.910.000	1.022.441.418	55,21
	<b>Jumlah</b>	<b>95.661.113.000</b>	<b>80.311.660.909</b>	<b>83,95</b>
<b>II.</b>	<b>PENGABDIAN</b>			
	1) Pengabdian kepada masyarakat	4.112.494.000	3.928.072.551	95,52
	2) Sarana dan Prasarana PTKI melalui SBSN	43.447.086.000	28.358.609.056	65,27
	3) Mahasiswa penerima beasiswa peningkatan prestasi (Prodi ilmu dasar islam)	722.000.000	716.000.000	99,17
	4) Mahasiswa penerima beasiswa kajian keislaman (Prodi ilmu islam)	110.000.000	110.000.000	100
	5) Bidik Misi PTKI	7.933.800.000	7.861.800.000	99,09
	6) Mahasiwa PTKI Penerima Beasiswa Tahfidz Al-Quran	161.000.000	161.000.000	100
	<b>Jumlah</b>	<b>56.486.380.000</b>	<b>41.135.481.607</b>	<b>72,82</b>
<b>III.</b>	<b>PENELITIAN</b>			
	1) Penelitian pada PTKI	8.727.824.000	8.495.355.449	99,09
	<b>Jumlah</b>	<b>8.727.824.000</b>	<b>8.495.355.449</b>	<b>99,09</b>
<b>IV.</b>	<b>GOOD GOVERNANCE</b>			
	1) Kopertais yang terbina	840.000.000	776.881.584	92,49
	2) Layanan Internal (Overhead)	11.580.775.000	10.906.875.226	94,18
	3) Layanan	57.043.572.000	45.039.419.196	78,96

	Perkantoran			
	4) Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	2.509.980.000	1.695.616.800	67,55
	5) Layanan Dukungan Manajimen Eselon I	101.599.981.000	996.318.944	82,78
	6) Layanan Perkantoran	100.396.439	94.022.047.479	93,65
	<b>Jumlah</b>	<b>273.970.847.000</b>	<b>153.437.159.229</b>	<b>56,00</b>
	<b>Total</b>	<b>334.449.725.000</b>	<b>283.379.657.194</b>	<b>84,73</b>

Sumber: Rekrorat UIN Suska Riau Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pendidikan dengan jumlah anggaran tersedia Rp. 95.661.113.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.80.311.660.909 dan persentase 83,95%.
- 2) Kegiatan pengabdian dengan jumlah anggaran tersedia Rp.56.486.380.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.41.135.481.607 dan persentase 72,82%.
- 3) Kegiatan penelitian dengan jumlah anggaran tersedia Rp.8.727.824.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.495.355.449 dan persentase 99,09%.
- 4) Kegiatan *Good Governance* dengan jumlah anggaran tersedia Rp.273.970.847.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.153.437.159.229 dan persentase 56.00%.

Dari total dana keseluruhan yang dianggarkan untuk pelaksanaan 17 (tujuh belas) kegiatan yang ada di UIN Suska Riau selama tahun 2017 yang dianggarkan sebesar Rp.334.449.725.000 dan kegiatan tersebut terealisasi sebesar Rp.283.379.657.194 dengan persentase 84,73%.

Kegagalan pelaksanaan perencanaan tidak harus membuat organisasi melupakan perencanaan. Perencanaan adalah wajib karena program-program itu menyangkut kegiatan-kegiatan yang kompleks dengan banyak orang yang terlibat. Perencanaan merupakan kegiatan-kegiatan yang disiapkan agar pada waktu program dilaksanakan, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sudah tersedia dan kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak yang saling tergantung satu sama lain dapat terlaksana. Perencana mengelola timing sumber-sumber program harus tersedia. Perencanaan menjadi sangat penting karena ia terkait dengan dana yang diperlukan untuk membeli alat, mengontrak atau membuat tenaga kerja tersedia, dan kontrak-kontrak dengan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perencanaan berperan dalam suatu proses yang menghasilkan suatu uraian yang terinci dan lengkap tentang program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam membuat perencanaan program kerja organisasi, seluruh pelaku organisasi haruslah terlibat secara aktif. Dari membuat analisa kondisi dan sumber daya organisasi hingga pada penetapan program yang tepat bagi organisasi pada satu periodesasi kepemimpinan. Dengan melakukan analisis kebutuhan dan penyusunan program secara bersama-sama, maka pada saat pelaksanaan (*actuating*) program tersebut, kendala dari internal organisasi dapat diminimalisir. Selain itu, seluruh pelaku organisasi akan mampu mengeksekusi program tersebut dengan baik, dikarenakan merekalah yang merencanakan dan memahami secara benar indikator dari keberhasilan program tersebut. Berdasarkan pemahaman di atas dan melihat fenomena yang terjadi, maka penulis dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perencanaan Program Kegiatan Pada Biro Administrasi Umum**

## **Perencanaan Dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru”**

### **1.2. Perumusan Masalah.**

Sesuai dengan penjabaran latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perencanaan program kegiatan pada Biro Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- 2) Kendala dalam perencanaan kegiatan pada Biro Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

### **1.3. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis pelaksanaan perencanaan program kegiatan pada Biro Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perencanaan program kegiatan pada Biro Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

### **1.4. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya bagi :

- 1) Manfaat Akademis .

Penelitian dapat memperoleh pengalaman dalam menerapkan berbagai konsep dan teori berkenan dengan kebijakan peraturan dalam penyusunan perencanaan.

2) Manfaat Praktis.

Penelitian dapat memperoleh pengalaman dalam menerapkan berbagai konsep dan teori berkenaan dengan kebijakan peraturan dalam penyusunan perencanaan.

3) Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain dalam memberikan sumbangan teori untuk menelaah masalah yang sama dengan aspek yang berbeda.

